

## TAJUK RENCANA

### Antraks, Perlu Terus Diwaspadai

**BERITA** munculnya penyakit antraks pada hewan ternak di Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop dan Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Gunungkidul cukup mengejutkan (KR, Kamis 10/4). Apalagi jumlahnya juga banyak, dalam dua bulan tercatat 20 kasus kematian ternak. Lebih dari itu juga sudah mengenai pada manusia, di mana 5 warga terpapar, 3 di antaranya sudah dinyatakan positif antraks.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Wibawanti Wulandari, menjelaskan, mendapat informasi adanya ternak yang mati mendadak pihaknya langsung turun untuk mengambil sampel guna diuji laboratorium. Namun proses pengambilan sampel tidak berjalan lancar karena sebagian besar bangkai sapi sudah telanjur disembelih dan dagingnya dijual oleh pemiliknya sebelum petugas datang. Dengan begitu berarti, dagingnya sudah dibeli orang dan kemudian dikonsumsi, sehingga penyakit tersebut bisa menular ke manusia. Hal semacam itu dulu juga pernah terjadi.

Realitas ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan penyakit antraks, khususnya di kalangan para peternak, tergolong masih kurang. Mestinya masyarakat sadar, kalau ada ternak mati mendadak langsung melaporkannya kepada pihak-pihak terkait, misalnya survilans dan Dinas Peternakan yang kemudian akan bertindak sesuai System Operational Procedure (SOP). Untuk itu masyarakat memang perlu terus disadarkan akan bahaya penyakit antraks yang termasuk zoonosis, penyakit dari hewan yang bisa menular ke manusia.

DIY memang termasuk daerah endemi antraks. Dulu kasus antraks sudah muncul. Ke depan kemungkinan muncul lagi masih bisa terjadi. Karena itu harus terus diwaspadai. Upaya untuk mengantisipasi harus terus dilakukan dengan harapan ke depan tidak muncul kasus ini lagi. Kalaupun muncul bisa cepat tertangani dan teratasi, serta tidak sampai ke manusia.

Terkait hal ini sebenarnya Pemda

DIY sudah membentuk Tim Koordinasi Tim Koordinasi (Tikor) Zoonosis. Tikor dibentuk dengan SK Gubernur DIY dan melibatkan berbagai kalangan stakeholder dari tingkat provinsi sampai Kapanewon, Kalurahan bahkan pedusunan/padukuhan. Dengan adanya koordinasi semua pihak terkait, maka kalau muncul penyakit antraks bisa dengan cepat tertangani.

Di antara tugas Tikor Zoonosis adalah edukasi kepada masyarakat peternak sapi. Sebab, karena ketidaktahuannya, biasanya mereka merasa *eman-eman* terhadap dagingnya kalau ternaknya mati, sebab ternak merupakan bagian dari kekayaan atau *rojokoyo* dan harganya mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Padahal kalau matinya karena antraks, dengan disembelih darahnya membawa bakteri yang kemudian mengenai manusia atau tetap hidup di tanah sampai puluhan tahun. Karena antraks yang hidup inang, keluar dari tubuh sapi bersama darah jadi spora dan spora bisa bertahan hingga puluhan tahun. Secara syariat juga diharamkan makan daging bangkai.

Karena itu sudah ada SOPnya, sapi mati karena antraks, harus dikubur dalam beton. Lokasinya juga harus dipleset dengan semen yang kuat dan tidak boleh dibongkar dalam waktu lama. Sebab sporanya masih akan bertahan hidup sampai puluhan tahun, sehingga kalau dibuka masih bisa menyebar ke mana-mana tak terkendali, termasuk ke manusia. Apalagi kalau spora yang menempel di tanah kemudian terbawa air.

Idealnya memang pemerintah menyediakan uang pengganti bagi masyarakat yang ternaknya mati karena antraks, sehingga mereka dengan senang hati sapi bangkainya dikubur, karena tidak dirugikan. Namun untuk ini harus disiapkan aturan dan mekanisme yang jelas, sehingga ternak yang mati bukan karena antraks lantas 'diantraskan' agar mendapat ganti.

Pendek kata, antraks termasuk penyakit yang perlu terus diwaspadai. Edukasi kepada para peternak tidak boleh berhenti. (\*)-d



"IT was the best of times, it was the worst of times..."

Demikian Charles Dickens membuka *A Tale of Two Cities* sebuah novel tentang masa di mana harapan dan kehancuran hidup berdampingan.

Kalimat ini terasa relevan saat kita menatap horizon ekonomi global hari ini. Dunia seakan tengah berdiri di persimpangan: antara pemulihan pascapandemi dan bayang-bayang perlambatan ekonomi baru yang dipicu perang dagang serta proteksionisme.

#### Tanda-tanda yang tak Bisa Diabaikan

Krisis tidak pernah datang tiba-tiba. Ia didahului oleh tanda-tanda ibarat langit yang mendung sebelum hujan badai turun. Dalam beberapa bulan terakhir, lonjakan harga emas dunia dan penurunan tajam indeks saham global menjadi dua indikator klasik yang perlu dicermati. Emas, sebagai aset lindung nilai, melonjak karena meningkatnya kecemasan terhadap instabilitas keuangan global. Di sisi lain, pasar saham menunjukkan volatilitas tinggi sebagai reaksi atas tekanan geopolitik dan ekonomi yang meningkat.

Kebijakan Presiden Amerika Serikat yang kembali menaikkan tarif impor hingga 32% menjadi pemantik terbaru ketegangan global. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi hubungan dagang AS-Tiongkok, tetapi juga menyulut spiral proteksionisme yang dapat berdampak luas. Di Indonesia, sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan udang adalah beberapa yang paling rentan. Mereka padat karya, bergantung pada pasar ekspor, dan kini menghadapi tantangan ganda: permintaan global yang menurun dan beban tarif yang meningkat.

Indonesia masih memiliki waktu walau tak banyak untuk bersiap menghadapi potensi badai ini. Dengan rasio ekspor terhadap PDB sekitar 25%, ketertinggalan Indonesia terhadap pasar global memang relatif lebih rendah dibanding negara seperti Vietnam atau Singapura. Namun ini bukan berarti kita kebal, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Bila permintaan ekspor menurun drastis, potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor-sektor padat karya tidak bisa dihindari.

#### Negara Perlu Tampil di Garis Depan

Langkah antisipatif harus dimulai dari deregulasi yang mengurangi beban pelaku usaha, terutama UMKM dan industri padat karya. Relaksasi fiskal terbatas, insentif perpajakan, dan penyederhanaan birokrasi men-

### Riski Raisa Putra

jadi prasyarat menjaga kelangsungan bisnis. Diversifikasi pasar ekspor ke kawasan ASEAN dan Asia Timur juga perlu dipercepat, guna mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang sedang berkonflik dagang dengan AS.

Di sisi tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial menjadi penting. Program subsidi upah dan bantuan langsung tunai harus disiapkan kembali untuk mengantisipasi penurunan daya beli. Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga perlu diperluas caku-



KR-JOKO SANTOSO

pannya bukan hanya untuk pekerja formal di kota besar, tetapi juga buruh pabrik dan pekerja informal yang sangat rentan terhadap gejolak eksternal.

Bila skenario terburuk terjadi yakni perlambatan ekonomi global yang menekan pertumbuhan domestik dan menciptakan gelombang PHK negara harus sigap menjadi aktor utama dalam menjaga pasar kerja tetap hidup.

Program padat karya publik dapat menjadi solusi transisional untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah harus memfasilitasi pelatihan ulang secara masif, terutama di sektor-sektor yang tetap tumbuh seperti logistik, pertanian modern, ekonomi digital, dan energi terbarukan. Namun pelatihan harus diiringi dengan insentif nyata bagi penciptaan lapangan kerja baru, termasuk melalui proyek infrastruktur kecil di daerah-daerah rawan pengangguran.

Di tengah tekanan global, pelemahan nilai tukar rupiah juga bisa menjadi senjata dua mata. Satu sisi, depresiasi bisa membuat ekspor lebih kompetitif, namun di sisi lain, inflasi bisa naik dan menghantam daya beli. Kebijakan makro harus dijaga tetap seim-

## Menyimak Isyarat Global, Melindungi Pekerja Lokal

bang: cukup longgar untuk mendukung sektor produktif, namun cukup ketat untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

#### Memulihkan Ekonomi, Momentu Merekonstruksi Dunia Kerja

Setiap krisis membawa peluang. Jika negara mampu melewati badai ini, fase pemulihan harus digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang terutama sistem ketenagakerjaan. Transformasi ekonomi informal menjadi formal perlu dipercepat melalui insentif, bukan pemaksaan. Legalitas usaha, akses ke pembiayaan, dan perlindungan sosial adalah tiga kunci untuk mendorong transisi tersebut.

Revitilisasi pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan teknologi masa depan adalah keniscayaan. Demikian pula dengan desain kebijakan pengupahan yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi, globalisasi, dan produktivitas. Krisis juga menjadi panggilan untuk memperluas basis industri nasional, terutama di luar Jawa, agar ketahanan ekonomi menjadi lebih merata.

Indonesia juga harus menjadikan ketegangan dagang global sebagai peluang. Banyak investor yang kini mencari alternatif dari Tiongkok. Dengan menciptakan iklim usaha yang lebih ramah, Indonesia bisa menjadi tujuan relokasi industri yang strategis, sebagaimana dilakukan Vietnam.

Sebagaimana Dickens mengisahkan dua kota yang dilanda kekacauan namun tetap menyimpan harapan, Indonesia pun hari ini berada di titik krusial: apakah akan tergulung gelombang atau justru menavigasi badai dengan keberanian dan kecermatan. Jika kita mampu menyimak isyarat global dan melindungi pekerja dengan langkah konkret, maka "the worst of times" bisa berubah menjadi "the best of times" sebuah kisah tentang daya tahan bangsa yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dengan arah baru yang lebih inklusif dan adil. (\*)-d

**\*)Riski Raisa Putra, Staf Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas RI. Alumni FE-UGM dan Illinois University Amerika.**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H. Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zuboedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

- W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Proteksionisme Ala Trump Vs Bela Beli Ala Hasto Wardoyo



DI tengah hingar-bingar kebijakan Donald Trump yang menaikkan tarif impor secara masif hingga mengguncang pasar global, kita diingatkan pada sebuah gerakan serupa skala lokal: Program Bela Beli Kulonprogo yang digagas Hasto Wardoyo (waktu itu Bupati Kulonprogo, kini Walikota Yogyakarta). Meski berbeda dalam skala dan implementasi, kedua kebijakan ini memiliki semangat sama, yakni melindungi ekonomi domestik di tengah arus globalisasi.

Keduanya bertemu di titik ideologis, yakni masalah proteksi terhadap produk lokal. Jika Trump menggunakan tarif untuk melindungi industri AS dari gempuran produk luar negeri, Hasto melindungi UMKM dan petani Kulonprogo dari kebangkrutan. Keduanya, meski berbeda skala, berbagi esensi yang sama: negara/pemerintah harus hadir melindungi kepentingan domestik ketika globalisasi justru menggerus kedaulatan.

Melalui kebijakan wajib penggunaan batik lokal, pembelian beras produksi petani Kulonprogo, dan kampanye sistematis beli produk daerah, Bupati Hasto Wardoyo membuktikan bahwa proteksionisme ekonomi dapat diimplementasikan sebagai strategi nyata, bukan sekadar retorika untuk membangun kemandirian ekonomi di tingkat kabupaten

#### Nasionalisme Ekonomi: Antara Ideologi dan Realitas Pahit

Langkah Trump dan Hasto bukan sekadar respons emosional, melainkan cerminan krisis ideologis globalisasi. Amerika Serikat, sebagai arsitek perdagangan bebas, kini menolak sistem yang dulu dipromosikannya setelah kehilangan 5 juta lapangan kerja manufaktur (2000-2010).

Sementara itu, Kulonprogo, yang terancam oleh banjir produk murah, baik impor maupun dari daerah lain dan ketergantungan teknologi, memilih membangun benteng pertahanan lewat konsumsi lokal. Di sini, proteksionisme menjadi 'obat pahit' bagi luka struktural: deindustrialisasi, ketimpangan, dan hilangnya identitas produksi. Bagi AS, ini soal mempertahankan status adidaya; bagi Indonesia, ini soal survival ekono-

### Wahyu Indro Widodo

mi rakyat yang terancam menjadi "Semut vs Goliath di kancah global".

Selama dua dekade, Indonesia terjebak dalam paradoks perdagangan bebas. Di satu sisi, ekspor mencapai rekor USD 258,8 miliar (2023), tetapi 60%-nya masih bergantung pada komoditas mentah. Di sisi lain, pasar domestik dibanjiri 80% produk tekstil dan elektronik China, mematikan 2.500 UMKM per tahun (Data Kemenkop UKM, 2022).

Kebijakan Bela Beli Kulonprogo menunjukkan bahwa proteksi selektif, Contohnya, PNS diwajibkan membeli beras petani lokal dan mengenakan batik khas Kulonprogo pada hari tertentu, saat itu bisa menjadi solusi alternatif.

Semangat proteksi selektif seperti di Kulonprogo seharusnya menjadi inspirasi nasional. Sayangnya, Pemerintah Indonesia masih kerap bersikap gamang. Alih-alih melindungi sektor strategis, berbagai perjanjian dagang seperti RCEP dan IPEF justru membuka lebar kran impor, membuat industri vital seperti baja dan tekstil semakin rentan tanpa perlindungan yang memadai. (Sumber: https://kadata.co.id/).

Riset Peterson Institute menunjukkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) kian tergantung pada impor manufaktur China, yang mencapai 30% total impor di Kawasan (Sumber: https://aspistrategist.org.au). Akibatnya, Indonesia menjadi "pasar abadi" bagi negara lain, tanpa nilai tambah signifikan.

Mengutip Kompas bahwa Proteksionisme bukanlah kutukan, sebagaimana kerap digambarkan dalam buku-buku ekonomi arus utama. Ia adalah alat kebijakan yang sah, selama dijalankan dengan bijak dan terukur. Negara-negara maju telah lama mempraktikkannya, bahkan ketika mereka mengkampanyekan perdagangan bebas.

Mereka melindungi petani dan industri strategis, serta membatasi akses asing ke sektor vital dari kompetisi asing. Indonesia pun berhak mengambil langkah serupa. Bukan untuk memenuhi dunia, tetapi untuk memberi ruang bagi indus-

tri lokal agar bisa tumbuh dan berkembang.

#### Menuju Kemandirian yang Berdaulat

Langkah Trump dan Hasto mengajarkan bahwa proteksionisme bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan ruang bernapas bagi industri domestik. Indonesia perlu merumuskan *smart protectionism*: memberlakukan tarif proporsional untuk sektor rentan dan padat karya seperti tekstil, elektronik, alas kaki, furnitur, serta industri kreatif berbasis UMKM.

Program Bela Beli perlu diadopsi nasional dengan mewajibkan penggunaan produk lokal di instansi pemerintah dan BUMN. Namun, ini harus dibarengi dengan revolusi pendidikan, riset berbasis industri, dan reformasi birokrasi yang memberangus mentalitas impor.

Indonesia bukan negara kecil. Dengan populasi terbesar keempat dunia, kekayaan alam, dan pasar domestik yang kuat, Indonesia hanya butuh arah yang jelas dan keberanian untuk berkata: "kita akan bermain dengan aturan kita sendiri."

Dunia mungkin tak setuju, tapi begitulah bangsa besar dibangun. Saatnya Indonesia menerapkan proteksionisme cerdas dan berani merebut masa depan.

Seperti kata Hasto, "Kita harus berjuang dengan senjata yang kita punya." Di era ekonomi sebagai senjata, Indonesia tak bisa lagi hanya menjadi penonton. (\*)-d

**\*)Dr (CAN) Wahyu Indro Widodo SST MMPAR, Direktur Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti (AKPARDA) untuk periode 2023 - 2027.**

## Pojok KR

Kuda andong akan dipasangi 'pampers'.  
- Tanpa 'pampers' tak boleh beroperasi.

\*\*\*

Yogya tujuan favorit liburan lebaran.  
- Image baik yang harus terus dijaga.

\*\*\*

Stok BBM aman pasca-Idul Fitri  
- Harga dan takaran harus tetap aman.

Berabe